PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SALEMBA

A. Ferinkie

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul. Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan dan penindakan penyakit menular TB terhadap narapidana. Menurut survei prevalensi TB tahun 2014 memperkirakan beban kasus TB yang masih tinggi di masyarakat. Angka penemuan kasus yang dilaporkan oleh program pengendalian TB nasional lebih rendah dari perkiraan jumlah kasus TB dari survei prevalensi TB. Hal ini berarti perlu dilakukan menjadi 60% (2013) dan 46% (2014). Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di lapas dengan penemuan kasus yang intensif terutama pada kelompok-kelompok risiko tinggi TB seperti di lapas. Setiap tahun dilaporkan terdapat 1 juta kasus TB baru atau 399 kasus TB baru per 100.000 populasi. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in dept interview), observasi dan dokumentasi. Prosedur pemilihan subjek menggunakan teknik purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, yakni narapidana yang sedang menjalani hukuman pidananya di Lembaga Pemasaryakatan Kelas II A salemba.

Kata Kunci: Pencegahan dan Penindakan, TUBERKULOSIS, Narapidana

PENDAHULUAN

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, sehingga pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana terhadap badan yang

E-Mail : ferinkie1234@gmail.com
DOI : www.dx.doi.org 10.31604/justitia.v7i1.409-419
Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

dipandang kejam. Pidana penjara yang merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim, patut mendapat perhatian lebih dan perlu diperbaharui. Menurut Mulder bahwa: "Politik Hukum Pidana harus selalu memperhatikan masalah pembaharuan juga dalam masalah perampasan kemerdekaan". Semakin sedikit orang dirampas kemerdekaannya semakin baik. Pandangan terhadap pidana perampasan kemerdekaan juga dapat berakibat kembali sebagai boomerang.

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa atau perampasan kemerdekaan yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan - tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan - tindakan. Sehingga tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya

"Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan - tindakan. Sehingga tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya."

Sejauh ini, sistem penanganan narapidana di Indonesia belum maksimal, hal tersebut bisa dilihat dari Lembaga Pemasyarakatan yang belum memadai untuk para narapidana sehingga menimbulkan Overcrowding dan menyebabkan mudahnya para narapidana terkena penyakit dikarenakan terbatasnya ruang gerak mereka akibat belum maksimalnya pencegahan dan penindakan penyakit menular di area Lembaga Pemasyarakatan sehingga resiko penularan penyakit sangat mudah rentan terjadi kepada narapidana akan berdampak kepada satu sama lain.

Hal yang disampaikan ini tentunya sangat berdampak pada tidak terbandungnya jumlah penghuni yang terus bertambah dengan kata lain arus masuk yang dibuka dengan sangat lebar berbanding terbalik dengan arus keluar yang diperketat dengan sejumlah peraturan yang mengakibatkan terjadinya kelebihan penghuni hampir disetiap Lapas/ Rutan di Indonesia. Kondisi kepadatan dan kelebihan kapasitas hunian tersebut apakah akan terselesaikan dengan hanya menambah jumlah hunian dengan cara membangun Lapas/Rutan baru setiap tahunnya untuk mengimbangi jumlah penghuni yang hampir

meningkat setiap tahunnya, data jumlah tahanan dan narapidana pada Lapas/Rutan di Indonesia dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 peningkatan Jumlah Tahana dan Narapidana pada Rutan dan Lapas Nasionala 2013-2017

No	Tahun	Tahanan	Narapidana	Jumlah Total Penghuni	Kapasitas Hunian Rutan dan Lapas	Selisih antara Jumlah Total Penghuni dengan Kapasitas hunian	Persentase Kelebihan Penghuni
1	2014	52.935	110.469	163.404	114.921	48.483	142%
2	2015	57.547	119.207	176.754	119.797	56.957	147%
3	2016	65.554	138.997	204.551	119.797	84.757	170%
4	2017	70.739	161.342	232.081	123.481	108.600	188%
5	2017	70.739	161.342	232.081	123.481	108.600	188%

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, 2017

Dapat dilihat dari tabel di atas, pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya mengalami peningkatan, jika dicermati penambahan kapasitas hunian Rutan dan Lapas pada tahun 2014 dibandingkan dengan 2015 tidak menjawab permasalahan kelebihan kapasitas yang terjadi, terlihat dalam tabel adanya persentase kelebihan penghuni yang meningkat dikarenakan jumlah total tahanan dan narapidana juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Meskipun sudah ada upaya untuk membangun tempat-tempat baru Lapas dan Rutan yang dilakukan pemerintah melalui Ditjen Pemasyarakatan dengan tujuan menambah jumlah hunian, namun hal tersebut akan menjadi percuma jika lonjakan pertumbuhan jumlah orang yang akan masuk rutan dan lapas juga akan meningkat

Dengan demikian potensi penularan penyakit menular seperti HIV, AIDS, TBC, ISPA dan yang lainnya sangat memungkinkan terjadi di lembaga pemasyarakatan Karena dengan banyaknya narapidana yang melebihi kapasitas lapas, hal ini bisa membuat penularan penyakit tersebut dengan dengan pesat, pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan, telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kini telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

survei prevalensi TB tahun 2014 memperkirakan beban kasus TB yang masih tinggi di masyarakat. Angka penemuan kasus yang dilaporkan oleh program pengendalian TB nasional lebih rendah dari perkiraan jumlah kasus TB dari survei prevalensi TB. Hal ini berarti perlu dilakukan menjadi 60% (2013) dan 46% (2014). Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di lapas dengan penemuan kasus yang intensif terutama pada kelompok-kelompok risiko tinggi TB seperti di lapas. Setiap tahun dilaporkan terdapat 1 juta kasus TB baru atau 399 kasus TB baru per 100.000 populasi. Angka penemuan kasus baru TB secara nasional mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2012 CDR 61%, turun diperberat oleh situasi lapas yang sebagian besar menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melebihi kapasitas daya huni terutama di kota-kota besar, berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan WBP dalam penularan TB.

Pemenuhan terhadap hak - hak warga binaan pemasyarakatan ini, terutama dalam hal hak mendapatkan pelayanan kesehatan sering tidak dapat terlaksana dengan baik atau sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang tidak dapat terpenuhi "Adi Sujatno, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hal. 21 dengan baik sehingga menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat penampungan orang - orang yang dihukum, oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul: "Pencegahan dan penindakan penyakit menular terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba"

Tuberkolosis

Tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri kompleks *Mycobacterium tuberculosis* yang biasanya menyerang paru-paru, walaupun organ lainnya terlibat dalam sepertiga kasus. Penularan biasanya terjadi melalui penyebaran percikan dahak yang diproduksi oleh pasien tuberkulosis paru yang menular (Raviglione MC, 2008).

Epidemiologi

Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular mematikan dan sampai saat ini masih menjadi perhatian dunia. Berdasarkan laporan WHO, pada tahun 2013 sekitar 9 juta orang menderita tuberkulosis dan 1,5 juta di antaranya meninggal dunia. Tahun 2013 diestimasikan 9 juta orang di dunia menderita tuberkulosis, dan lebih dari 56% tersebar di Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Di tahun berikutnya kasus tuberkulosis semakin meningkat.

Data terbaru dari WHO mengatakan bahwa di tahun 2014 sekitar 9,6 juta orang menderita tuberkulosis dan 1,2 juta di antaranya meninggal dunia. Kasus TB tersebut menyerang 9,6 juta jiwa yang terdiri dari pria 5,4 juta jiwa, wanita 3,2 juta jiwa dan anak-anak 1,0 juta jiwa (WHO, 2014, 2015).

Indonesia saat ini telah menempati negara terbesar ke-dua setelah India dengan kasus TB terbanyak yakni 10% dari seluruh penderita di dunia. Indonesia memiliki angka prevalensi tuberkulosis yakni sebesar 647 per 100.000 penduduk dengan angka insidensi 399 per 100.000 penduduk dan angka mortalitas 41 per 100.000 penduduk (WHO, 2015). Kasus tuberkulosis di tahun 2014 mengalami peningkatan yakni dari 324.539 kasus menjadi 330.910 kasus di tahun berikutnya (Kementerian Kesehatan RI, 2016b).

Etiologi

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dari kelompok *Mycobacterium* yaitu *Mycobacterium tuberculosis* (Dirjen P2&PL, 2014).

Secara umum sifat kuman TB (*Mycobacterium tuberculosis*) antara lain adalah sebagai berikut (PDPI, 2011) :

- a. Berbentuk batang dengan panjang 1-10 mikron, lebar 0,2-0,6 mikron.
- b. Bersifat tahan asam dalam pewarnaan dengan metode Ziehl Neelsen.
- c. Kuman nampak berbentuk batang berwarna merah dalam pemeriksaan di bawah mikroskop.
- d. Tahan terhadap suhu rendah sehingga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama pada suhu antara 4°C sampai minus 70°C.
- e. Kuman sangat peka terhadap panas, sinar matahari dan sinar ultraviolet.
- f. Paparan langsung terhadap sinar ultraviolet, sebagian besar kuman akan mati dalam waktu beberapa menit.
- g. Dalam dahak pada suhu antara 30-37°C akan mati dalam waktu lebih kurang 1 minggu.
- h. Kuman dapat bersifat dormant ("tidur" / tidak berkembang).

Patogenesis

Tuberkulosis Primer

Partikel kuman TB yang masuk melalui saluran napas akan bersarang di jaringan paru. Partikel dapat masuk ke alveolar bila ukuran partikel <5 mikrometer. Kuman akan dihadapi pertama kali oleh neutrofil, kemudian makrofag. Kebanyakan partikel ini akan mati oleh makrofag keluar dari percabangan trakeobronkial bersama gerakan silia dan sekretnya (Amin, 2014).

Bila kuman hidup, maka kuman akan berkembang biak dalam sitoplasma makrofag. Di sini kuman dapat terbawa masuk ke organ tubuh lainnya. Kuman yang bersarang di jaringan paru akan berbentuk sarang primer atau afek primer atau sarang fokus (Ghon).

Narapidana

Pengertian Narapidana

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan. dari hakim. Secara umum Narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian . Selanjutnya berdasarkan kamus hukum, Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan .Menurut Arimbi Heroepoetri, Imprisoned person atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan . Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Sedangkan pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara, yang menurut R.A.Koesnun menjadi pidana pokok dimana-mana sampai seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis . Sistem pidana hilang kemerdekaan yang dimulai dengan penutupan bersama siang dan malam, berubah ditutup sendirian siang malam,

kemudian siang bersama dan malam sendirian. Tetapi masih dikurung rapat dalam empat tembok. Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- Umur
- Jenis kelamin
- Lama pidana yang dijatuhkan
- Jenis Kejahatan
- Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Jadi Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma - norma (aturan - aturan) oleh alat - alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Hak-Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak - hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak - hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hakhak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di- atas .

Manusia sebagai warga negara dan makhluk sosial memerlukan manusia lain dalam keseharian yang biasanya disebut dengan interaksi sosial. Manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain tidak selalu berjalan normal, akan tetapi ada benturan - benturan yang mengarah pada pelanggaran hukum.

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di LAPAS dengan status narapidana. LAPAS merupakan sarana untuk merubah tingkah laku Narapidana (rehabilitasi) agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat luas yang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

LAPAS yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (treatment

approach) memberikan perlindungan dan penegakan hak - hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normative terhadap Narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitative, korektif, edukatif, integratif.

Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapat pengurangan masa pidana.

- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapat pembebasan bersyarat.
- l. Mendapat cuti menjelang bebas.
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena tujuan penelitian ingin mengetahui kedalaman permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menyajikan data secara deskriptif (Poerwandari, 2011). Menurut Sugioyono (2008:15) bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Sementara itu Nawawi dan Martini (1994:73) mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Selain itu, studi deskriptif analisis menurut Winarno (Dadang Supardan, 2000:103) adalah suatu penelitian yang tertuju pada penelaan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiono, (2012:3) adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Metode kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya bahwa metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan, objek dan subjek penelitian. Guna menemukan hasil penelitian ini, maka peneliti menempuh beberapa langkah yaitu pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan serta penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian secara objektif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba.. hasil dari proses Observasi serta wawancara dilapangan kemudian ditambahkan dengan analisis awal oleh peneliti sebelum turun lapangan. Karena Penelitian ingin mengetahui dinamika penerimaan diri pada narapidana anak. Penelitian ini menggunakan 20 subjek penelitian dengan teknik purposive sampling sebagai metode pemilihan subjek, adapun kriteria subjek dalam penelitian ini adalah narapidana anak yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba

Penutupan

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan mengetahui pencegahan dan penindakan terhadap penyakit TB pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A salemba dengan teori pendukung terkait pencegahan dan penindakan sehingga hak hak atas pelayanan narapidana akan terpenuhi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Salemba

Daftar Pustaka

DwidjaPriyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*

Adi Sujatno, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasayarakatan,

Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar

Y. Al-Barry Dahlan, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Prees, Surabaya, Hal.

Arimbi Heroepoetri, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam*, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta

R.A. Koesnun. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Sumur Bandung, Bandung

Handayani, O. (2010). *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana DalamRangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Di Lapas Kelas IIASragen*. Skripsi. Fakultas Hukum : Universitas Hukum Sebelas Maret

Poerwandari, K. (2011). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3, Universitas Indonesia.

Widagdo, S. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka

<http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> diakses pada tanggal 4 April 2020 jam 10.00

<http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-11/S56615-Rosalina> diakses pada tanggal 4 April 2020 jam 13.00

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63792/Chapter%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses pada tanggal 7 April 2020 jam 10.00

<http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-11/S56615-Rosalina> diakses pada tanggal 7 April 2020 jam 11